



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata. Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.

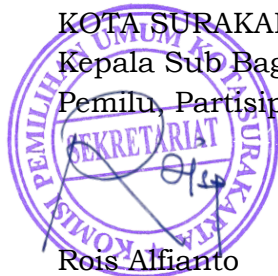
Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Manajemen Perubahan	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim RB	SK Tim Reformasi Birokrasi di KPU Kota Surakarta, dan SK Perubahan sepanjang ada Perubahan Personel dan Tupoksi di Sekretariat KPU Kota Surakarta	v														Rendatin	
		Pembangunan komitmen seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Seluruh Pegawai pada setiap Awal Tahun	v															Rendatin
		2 Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental																	
		3 FGD Penyusunan Rencana Aksi	Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi			v												Rendatin	

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses oleh <i>stakeholder internal</i> maupun <i>eksternal</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin	
			Kolom Reformasi Birokrasi di website yang berisi dokumentasi/ pelaporan Reformasi Birokrasi												v	Rendatin	
		2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM
			Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM	
		3 Penandatanganan Pakta Integritas	Persentase Penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	v													Rendatin
		Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Persentase Pelaporan LHKPN dan LHKASN			v											HSDM
		Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi Pencanaan ZI														Rendatin
		Manajemen Benturan Kepentingan	Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan					v									Rendatin
			Penandatanganan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan						v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan 4 menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja	Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/satuan kerja	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM	
			Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam SOP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin	
		5 Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	Tersedianya instrument reward and punishment	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM
			Pembangunan survei kepuasan layanan						v							v	Rendatin
3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1 Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Agen Perubahan	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Agen Perubahan						v						v	Rendatin	
		2 Melakukan Evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari rencana aksi						v						v	Rendatin	
			Terisinya lembar LKE unit												v	Rendatin	
		3 Melakukan Pelaporan	Terisinya lembar LKE unit												v	Rendatin	
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi rencana aksi												v	Rendatin	

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1	Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan	Pemetaan naskah dinas pengaturan dan penetapan	Adanya data perundang-undangan di lingkungan satker yang terupdate	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
	2	Menyempurnakan/Mengubah Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan atau penetapan	Adanya naskah dinas yang direvisi diakrenakan ada perubahan SDM/kebijakan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
	3	Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangan yang dipandang menghambat	Penyusunan revisi naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan kepada stakeholder	Adanya naskah dinas pengaturan dan penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
	4	Merumuskan peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas yang sesuai dengan kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah naskah dinas yang sudah disahkan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
	5	Pengelolaan JDIH	1 Pembangunan JDIH	JDIH dapat diakses	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
		2 Pengelolaan JDIH	Update data JDIH	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM		
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	1	Evaluasi Organisasi	1 FGD Evaluasi Organisasi	Dokumentasi Laporan												v	Rendatin	
			2 Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	Pelaporan kuesioner evaluasi organisasi ke KPU RI dan Kemenpan RB													v	Rendatin
	2	Penyesuaian SOTK	1 Dilaksanakannya penyesuaian SOTK sesuai mandat	SOTK	v													HSDM
			2 Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	v													

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PenataanTata Laksana	1 Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP	1 Penyusunan SOP	Penetapan dan pengesahan SOP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM	
		2 Evaluasi SOP	Evaluasi terhadap SOP yang telah ditetapkan												v	TPPHM	
	2 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1 Peningkatan kapasitas pengelola PPID	Meningkatnya Kepuasan Layanan PPID				v							v		HSDM	
		2 Pengelolaan PPID dan e-PPID	Tersedianya <i>update</i> laporan Jumlah permohonan informasi yang masuk, sedang diproses dan ditindaklanjuti	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM
	3 Tata Kelola dan implementasi SPBE di unit satker	1 Pemanfaatan aplikasi terintegrasi	Tersedianya laporan pemanfaatan aplikasi terintegrasi													v	Rendatin
		2 Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (LPSE,e-budgeting, dll)	Tersedianya laporan pemanfaatan aplikasi terintegrasi													v	Rendatin
	4 Penerapan sistem kearsipan yang handal	Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis dan dinamis, baik manual maupun digital	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	KUL
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Pembangunan sistem merit	1 Penerapan pengukuran kinerja individu	Seluruh pegawai memiliki SKP			v			v			v			v	HSDM	
			Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output/mutu/waktu/biaya)			v			v			v			v	HSDM	
		2 Penerapan disiplin dan kode etik	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya dan tahun ini												v	HSDM	

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja		v						v						HSDM		
			Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi		v							v						HSDM	
		4 Pengisian sistem informasi kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir	v													v	HSDM	
	2 Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di satker	Pembangunan jabatan fungsional di satker															HSDM	
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Penyusunan dan penetapan Renstra	Renstra satuan kerja	v													Rendatin		
		2 Reviu renstra satuan kerja	Renstra hasil review		v													Rendatin	
		3 Penetapan kinerja dengan menerapkan reward and punishment	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level eselon IV	v															Rendatin
		4 Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Persentase sasaran kinerja	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		Rendatin
		5 Pemanfaatan aplikasi anggaran yang terintegrasi	Penggunaan aplikasi terintegrasi dalam penganggaran	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		Rendatin
		6 Pengukuran capaian kinerja unt/satker	Persentase capaian kinerja unit/satker			v				v				v				v	Rendatin
		7 Evaluasi capaian kinerja unit/satker	Reviu Lakip		v														Rendatin
		8 Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Laporan Kinerja	v	v														Rendatin

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket.	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1 Pemutakhiran data kinerja di aplikasi e-lapkin	Terisinya aplikasi e-lapkin yang mutakhir			v			v			v			v	Rendatin	
		2 Pelatihan SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja	Pengelola PBJ bersertifikat		v												HSDM
Pengawasan	1 Pembangunan ZI	1 Pencanaan ZI	Terbentuknya tim ZI				v									Rendatin	
		2 Penyusunan Rencana Aksi ZI	Ditandatanganinya Piagam Integritas oleh para pihak dan saksi dan adanya rencana kerja ZI yg sudah dilegalkan-				v										Rendatin
		3 Pelaksanaan Rencana Aksi ZI	Dokumentasi kegiatan dari area ZI					v									Rendatin
			Persentase Kegiatan yg terlaksana dalam rencana aksi ZI										v				Rendatin
		4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tinjau Pembangunan ZI	Dokumentasi monitoring dan evaluasi pembangunan ZI												v		Rendatin
		5 Pengisian LKE ZI	Terisinya LKE ZI													v	Rendatin
			Terisinya PMPRB ZI													v	Rendatin
	2 Pelaksanaan pengendalian gratifikasi	1 Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi	Adanya sosialisasi gratifikasi		v												Rendatin
		2 <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi pada stakeholder		v												Rendatin
		3 Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi							v						v	Rendatin

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1 Identifikasi benturan kepentingan	potensi yang dapat menyebabkan benturan kepentingan	v													Rendatin	
		2 Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan	Persentase Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan					v										Rendatin
		3 Monitoring dan evaluasi	Dokumen laporan						v								v	Rendatin
4	Peningkatan SPIP di satker	1 Pembangunan SPIP	Adanya tim SPIP	v													TPPPHM	
		2 Pelaksanaan SPIP	Terlaksananya SPIP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM
		3 Monitoring dan Pelaporan SPIP	Pelaporan buku kendali tepat waktu	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TPPPHM
5	Penanganan pengaduan masyarakat	1 Pembangunan sistem pengaduan Masyarakat	Tersedianya sarana, pejabat pengelola, prosedur pengaduan	v													HSDM	
		2 Pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti						v								v	HSDM
		3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dumas	Laporan secara berkala						v								v	HSDM
6	Peningkatan integritas individu	1 Penyampaian LHKPN	Persentase wajib lapor			v											HSDM	
		2 Penyampaian LHKASN	Persentase wajib lapor			v												HSDM

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	Bulan												Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	7 Peningkatan akuntabilitas PBJ	1 Pembangunan UK PBJ	Adanya struktur pengelola PBJ	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin	
		2 Pengelolaan PBJ	Persentase pelaksanaan sesuai perpres 16/2018	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin
		3 Monitoring, evaluasi, pelaporan	Laporan PBJ													v	Rendatin
Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima	Pelayanan terpadu satu pintu	Maklumat Pelayanan	v												Rendatin	
			Indeks Kepuasan Layanan						v							v	Rendatin
	2 Mendorong inovasi sektor pelayanan		Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rendatin
			3 Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan	Tersedianya SOP Layanan Publik	v											
	Tersedianya <i>space</i> yang representatif untuk pelayanan publik	v															
4 Penerapan partisipasi publik	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan mandiri melalui <i>cekdp</i> online	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	HSDM	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

Ditetapkan di Surakarta
 Pada tanggal 19 Maret 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 YUSTINUS ARYA ARTHESWARA